

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Sektor informal memiliki peranan strategis dalam struktur perekonomian, khususnya dalam mendukung pengurangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial di suatu negara. Menurut ILO (2013), sektor informal mencakup seluruh aktivitas kerja yang berada di luar regulasi formal, di mana pekerjaannya seringkali berada dalam posisi yang rentan tanpa akses terhadap jaminan sosial serta minim representasi dalam lingkungan kerja. Pekerja informal umumnya mencakup individu yang bekerja secara mandiri (*self-employed*) maupun yang membantu usaha keluarga. Badan Pusat Statistik (BPS) memperluas definisi ini dengan memasukkan kelompok yang berusaha dibantu oleh pekerja tidak tetap atau yang tidak dibayar, serta pekerja bebas. Kontribusi sektor informal tidak hanya terbatas pada penyediaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup peningkatan pendapatan dan aktivitas produksi (ILO, 2013 dalam Muara, 2020). Fenomena informalitas merefleksikan berbagai kondisi dalam perekonomian, termasuk situasi para tenaga kerja. Banyak pekerja yang memilih masuk ke sektor informal karena keterbatasan pendidikan atau kondisi ekonomi yang sulit, yang menghambat akses mereka ke sektor formal (Deléchat & Medina, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 135,3 juta jiwa, penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal mencapai 80,24 juta orang, atau sekitar 59,31%. Sementara itu, sebanyak 55,06 juta orang atau 40,69% tercatat bekerja di sektor formal. Tingginya proporsi

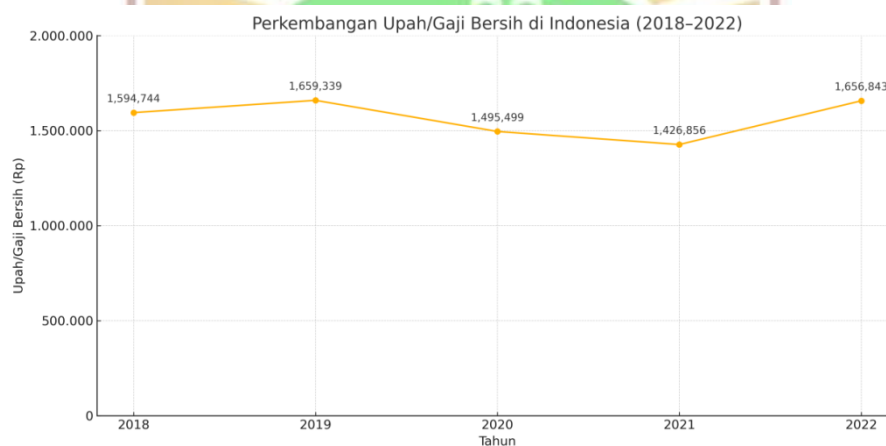
pekerja informal ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020, yang mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal. Fenomena serupa juga terjadi di Sumatera Barat, yang mengalami peningkatan signifikan jumlah pekerja informal sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Pekerja Formal dan Pekerja Informal Sumatera Barat 2018-2022 (Persen)

Di sisi lain, sektor informal menghadapi dampak yang cenderung lebih serius dibandingkan dengan sektor formal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, rendahnya tingkat produktivitas, serta terbatasnya akses terhadap sumber permodalan (Brokerhof, 2003 dalam Tasmilah et al., 2023). Tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor informal tercatat jauh lebih rendah, dengan estimasi hanya sekitar seperempat dari produktivitas pekerja di sektor formal (Amin et al., 2019). Perbedaan ini terjadi karena sektor informal umumnya menggunakan teknologi sederhana, memiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang rendah, serta mengalami hambatan dalam memperoleh layanan, akses pasar, maupun pembiayaan.

Walaupun sektor informal memberikan kompensasi dan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan sektor formal, sektor ini tetap memainkan peran penting dalam struktur perekonomian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Cuevas et al., 2007). Keberadaannya sering dipandang sebagai solusi sementara terhadap tingginya tingkat pengangguran, meskipun konsekuensi utamanya adalah rendahnya pendapatan dibandingkan dengan sektor formal (Sultana et al., 2022). Data lapangan menunjukkan bahwa rata-rata upah atau gaji pekerja informal di Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2 Upah Bersih Pekerja Informal Sumatera Barat 2018-2022 (Rupiah)

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa rata-rata upah atau gaji bersih pekerja informal mengalami penurunan signifikan pada awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, dari Rp1.659.339 di tahun 2019 menjadi Rp1.495.499. Penurunan ini berlanjut di tahun 2021 dengan rata-rata upah sebesar Rp1.426.856. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi pemulihan yang cukup kuat, dimana rata-rata upah meningkat menjadi Rp1.656.843 atau naik sekitar 16,15% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan rata-rata upah atau gaji pekerja informal di Sumatera Barat pada tahun 2022 dapat diasosiasikan dengan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini didasarkan pada keterkaitan erat antara upah dan produktivitas, di mana keduanya saling memengaruhi secara timbal balik (Stansbury & Summers, 2017). Upah mencerminkan hasil dari peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin tinggi produktivitas yang dicapai, maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kesejahteraan pekerja dan peningkatan standar hidup dalam jangka panjang (OECD, 2021).

Selain sebagai hasil dari produktivitas, upah juga berperan sebagai pemicu meningkatnya kinerja tenaga kerja. Peningkatan upah mampu mendorong motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat dan produktif. Dalam hal ini, kompensasi dan penghargaan atas kerja yang diberikan terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan semangat kerja (Grant, 2008 dalam Tumi et al., 2022). Lebih jauh lagi, upah dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk mengembangkan diri, baik melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, maupun pelatihan kerja guna meningkatkan penguasaan terhadap bidang pekerjaan mereka. Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas dapat diraih melalui investasi pada pendidikan, pelatihan serta pemanfaatan teknologi.

Seiring dengan transformasi digital yang semakin meluas, digitalisasi muncul sebagai faktor potensial dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, termasuk di sektor informal. Digitalisasi merujuk pada penggunaan alat digital seperti telepon genggam pintar, komputer, aplikasi, dan akses internet dalam aktivitas kerja. Di sektor informal, digitalisasi membuka peluang baru untuk mempercepat proses produksi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan

efisiensi kerja (UNCTAD, 2022). Pekerja informal yang menggunakan alat digital dalam aktivitas ekonominya berpotensi memperoleh hasil yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, sehingga produktivitas meningkat. Studi ILO (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di kalangan pekerja informal terbukti dapat meningkatkan pendapatan harian dan keberlanjutan usaha.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan digitalisasi memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas tenaga kerja. Misalnya, penelitian Dua & Garg (2019) serta Pedrini & Cappiello (2022) menemukan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan melalui pelatihan secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas individu. Hal ini diperkuat oleh Sari & Oktora (2021) yang menemukan bahwa digitalisasi membantu pelaku usaha informal mengakses pasar yang lebih luas, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan hasil kerja. Selain itu, Soesilowati & Salim (2009) menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemampuan pekerja untuk menyerap teknologi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja, sehingga produktivitas turut meningkat.

Namun demikian, temuan yang mendukung ini tidak bersifat mutlak. Beberapa penelitian seperti Fejoh & Faniran (2016), Varlamova & Larionova (2020), serta Laing (2021) menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, dan teknologi tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas, terutama jika tidak didukung oleh kualitas pelaksanaan, relevansi materi, atau kesiapan pekerja dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh. Bahkan, dalam konteks ekonomi tertentu, pendidikan yang tinggi tidak selalu berkorelasi positif

dengan produktivitas karena adanya *mismatch* atau ketidaksesuaian antara kompetensi dan kebutuhan dunia kerja (Magableh et al., 2022). Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan, pelatihan, digitalisasi, dan produktivitas perlu dikaji ulang secara kontekstual sesuai karakteristik wilayah dan sektor tenaga kerja yang diteliti.

Dengan melihat potensi sekaligus tantangan tersebut, penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana digitalisasi berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor informal. Penelitian ini menjadi relevan mengingat belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis sektor informal di wilayah Sumatera Barat, padahal daerah ini memiliki perkembangan infrastruktur digital yang terus meningkat dan proporsi pekerja informal yang tinggi.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor informal di Sumatera Barat, dengan menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021. Dalam penelitian ini, produktivitas diproksikan menjadi upah per individu / jam kerja per individu, sementara digitalisasi diukur melalui penggunaan alat digital seperti hp, komputer, dan alat digital lainnya. Variabel-variabel lain seperti pendidikan, jenis kelamin, umur, lokasi dan status pernikahan digunakan sebagai variabel kontrol untuk menghasilkan analisis yang objektif dan menyeluruh.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor informal di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor informal di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait pengaruh digitalisasi terhadap produktivitas tenaga kerja sektor informal yang dapat menambah literatur untuk penelitian mendatang dan dapat digunakan sebagai alternatif pertimbangan dalam menyusun strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor informal melalui penerapan digitalisasi untuk kemajuan perekonomian nasional.

